



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi diarahkan pada upaya untuk mewujudkan perekonomian negara yang mandiri dan handal untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh wilayah negara indonesia secara adil dan merata, dengan demikian pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan pendapatan bangsa indonesia, dimana sedang mengalami krisis ekonomi sedangkan roda pemerintahan dan pembangunan tidak mungkin dapat digerakkan tanpa dukungan dana terutama berasal dari pendapatan dalam negeri. Oleh karena itu pemerintah berusaha terus-menerus meningkatkan peranan sumber penerimaan negara, terutama penerimaan yang berasal dari non migas. Penerimaan dari non migas ini sebagian akan ditingkatkan melalui penerimaan dari sektor pajak. Misi utama Direktorat Jendral Pajak adalah misi fiskal yaitu menghimpun penerimaan pajak berdasarkan undang-undang perpajakan yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Pajak merupakan sarana yang digunakan pemerintah untuk memperoleh dana dari rakyat. Hasil penerimaan pajak tersebut untuk mengisi anggaran negara sekaligus membiayai keperluan belanja negara. Untuk itu, negara memerlukan dana yang cukup besar guna membiayai kegiatan pembangunan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan. Pajak dibedakan menjadi dua fungsi yaitu fungsi *budgetair* (sumber penerimaan negara) dan fungsi *regulerend* (mengatur). Fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sedangkan fungsi *regulerend* artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Dari fungsi ini pada dasarnya pemerintah ingin kembali menegaskan peranan penting pajak baik sebagai alat penerimaan negara seperti yang dijelaskan sebelumnya, maupun sebagai alat untuk melaksanakan berbagai kebijakan dibidang sosial ekonomi (Resmi, 2008)

Dalam rangka upaya peningkatan penerimaan pajak, pemerintah melakukan perubahan mendasar dengan dikeluarkannya UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merubah sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia yaitu digunakannya *self assesment system* yang menggantikan *official assesment system*. Kedua sistem ini memiliki perbedaan dalam mekanisme dan sudut pandang terhadap wajib pajak.

Pada *official assesment system* petugas pajak berkewajiban menetapkan berapa besar sesungguhnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, sedangkan pada *self assesment system* wajib pajak berkewajiban, menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Walaupun berbeda, kedua sistem penetapan pajak tersebut dalam praktiknya tetap memerlukan pengawasan dari pihak pemerintah dalam bentuk pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban untuk membayar pajak berhubungan erat dengan kualitas pelayanan terbaik yang diberikan aparat

pajak kepada wajib pajak. Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Aparat pajak harus senantiasa melakukan perbaikan kualitas pelayanan dengan tujuan agar dapat meningkatkan kepuasan dan kepatuhan wajib pajak. Banyak dari wajib pajak yang berpendapat bahwa aparat pajak hanya bisa berkuasa padahal kualitas dan profesionalisme aparat pajak masih menjadi pertanyaan besar. Hal ini membuat tingkat kepatuhan membayar pajak menjadi terpengaruh.

Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak tidak hanya dilakukan oleh Dirjen Pajak, tetapi juga dibutuhkan kesadaran dari wajib pajak itu sendiri untuk memenuhi kewajiban perpajakann. Kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah sering kali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat terjaring. Larche (1980) dalam Siti Masruroh (2013) juga mengemukakan bahwa kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dalam masyarakat. Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaran perpajakan wajib pajak maka akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam memaksimalkan penerimaan pajak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Tabel 1.1
Jumlah UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Tampan
Tahun 2014 – 2017

No	Tahun	Jumlah UMKM	Jumlah Pelaporan SPT	Rasio Tingkat Kepatuhan WP UMKM
1	2014	10908	2901	19,16%
2	2015	10853	2856	26,13%
3	2016	12167	3061	25,16%
4	2017	12539	3125	24,92%

Sumber: KPP Pratama Tampan Pekanbaru

Berdasarkan tabel diatas, jumlah wajib pajak yang terdaftar pada setiap tahunnya mengalami peningkatan, akan tetapi jumlah SPT tahunan yang dilaporkan tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar. Dapat dilihat tingkat rasio kepatuhan yang mana pada tahun 2017 dan 2016 menurun dibandingkan 2015. Hal ini berarti masih lemahnya kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan untuk membayar pajak.

Pemerintah perlu memperhatikan sektor UMKM secara serius. Peranan UMKM dalam perekonomian harus ikut diperhitungkan dalam proses merencanakan suatu kebijakan di bidang perpajakan. Banyaknya pelaku usaha UMKM bila diperhatikan secara seksama merupakan potensi yang akan berdampak pada peningkatan perilaku kepatuhan pajak.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Rifandhi Nur Akbar (2015) pengaruh pemahaman, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) (studi kasus pada UMKM di kota Malang). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebelumnya adalah menggantikan variabel sanksi perpajakan dengan tarif pajak, karena dari sistem perpajakan, aspek terendah yang dinilai kurang memotivasi wajib pajak dalam membayar pajak adalah berkenaan dengan tarif. Pengenaan tarif pajak akan berbanding lurus dengan minat wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Peneliti sebelumnya meneliti pada wilayah kota Malang, sedangkan peneliti meneliti pada wilayah Kota Pekanbaru.

Berdasarkan uraian masalah diatas, khususnya mengenai pajak, peneliti ingin mencoba meneliti dengan mengambil judul penelitian **“Pengaruh Pemahaman Peraturan , Kualitas Pelayanan dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun pokok-pokok masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman peraturan UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dirumuskan pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemahaman peraturan UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari peneliti ini adalah:

1. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi perusahaan, pemerintah, serta *stakeholder* lainnya dalam menjalankan aktifitasnya yang berkaitan dengan pemahaman peraturan UMKM, kualitas pelayanan dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi penelitian selanjutnya terutama berkaitan dengan pemahaman peraturan UMKM, kualitas pelayanan dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu pola dalam penyusunan karya ilmiah untuk memperoleh gambaran secara garis besar dari bab pertama hingga bab terakhir. Sistematika penulisan dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian. Penelitian ini disusun dengan urutan sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang pengaruh pemahaman peraturan UMKM, kualitas pelayanan dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, hukum pajak menurut pandangan Islam, penelitian terdahulu, hipotesis, pengembangan hipotesis dan kerangka konseptual.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel, definisi dan pengukuran operasional variabel, metode analisis data serta pengujian hipotesis.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian hasil dan pembahasan berisi tentang hasil penelitian secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode penelitian yang telah ditetapkan untuk selanjutnya diadakan pembahasan tentang hasilnya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan dari keseluruhan analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan di bab sebelumnya, keterbatasan penelitian dan saran yang dapat dipertimbangkan dalam penelitian selanjutnya.